

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.G Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Muri Yusuf. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2016). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Leo Agustino. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Leo Agustino. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ryant Nugroho Dwijowijoto. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Solichin Abdul Wahab. (2005). *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### **Jurnal**

Abdurrahman Faizal Bahari (2020). Analisis Kualitas Layanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 7, Nomor 1. 84-102.

Graciella Patras (2020). Kajian Yuridis Tentang Overcrowded Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017. *Journal Lex Et Societatis*. Volume 8, Nomor 1. 155-162

Insan Firdaus (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (*The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions*). Volume 13, Nomor 3. 339-358

Karimah Aini, Padmono Wibowo (2022). Implementasi Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. *Journal of Social Science Research*. Volume 2, Nomor 1. 145-152

Letares L.R Sianturi, Padmono Wibowo (2022). Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Lapas Kelas IIB Siborongborong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 10, Nomor 1. 21-32

Muhammad Alfaridzi, Padmono Wibowo (2021). Penanganan Overcrowded Pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Berdasarkan Permenkumham No. 11

Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 8, Nomor 6. 1683-1691

Nurwana Abubakar, La Ode Husen, Sri Lesatri Poernomo (2022). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psiktropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Kelas II A Sunguminasa. *Journal of Lex Generalis*. Volume 3, Nomor 9. 1446-1481

Rey Japa Bramada, Padmono Wibowo (2022). Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10 No. 1. 118-128

Ricky Fahriza (2020). Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 24 No. 2. 130-149

Selly Filanda, Nida Handayani, Mawar, Muhammad Khairul Anwar (2023). Strategi Penanganan Kelebihan Kapasitas Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah*. Volume 5, Nomor 1. 48-56

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (2020). Evaluasi Struktur Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14, Nomor 1. 43-60

Victorio H. Situmorang (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*). Volume 13, Nomor 1. 85-98

### **Publikasi Daring**

CNN Indonesia (2022). "Lapas RI Membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Daya Tampung Penjara".  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922084211-12->

851075/lapas-ri-membeludak-jumlah-napi-2-kali-lipat-daya-tampung-penjara. Diakses pada tanggal 4 Januari pukul 18.40.

Jakarta BPS (2020). “Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Lembaga Pemasyarakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan) dan Bulan di Provinsi DKI Jakarta (Number of Detainees and Prisoners by Prison and Month in DKI Jakarta Province). <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2021/08/23/267/jumlah-narapidana-dan-tahanan-menurut-lembaga-pemasyarakatan-lp-rumah-tahanan-rutan-dan-bulan-di-provinsi-dki-jakarta-2020.html>. Diakses pada tanggal 3 Januari pukul 17.20.

Lapas Narkotika Jakarta (2022). “Tugas Pokok dan Fungsi”. <https://lpnjakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>. Diakses pada tanggal 5 Januari pukul 18.34.

Singgih Wiryono (2022). “Kemenkumham Akui Lapas di Indonesia Sudah Tak Manusiawi”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/16325091/kemenkumham-akui-lapas-di-indonesia-sudah-tak-manusiawi>. Diakses pada tanggal 3 Januari pukul 15.30.

Syaiful Hakim (2023). “Ratusan warga binaan Lapas Narkotika jalani asesmen untuk remisi”. <https://www.antaraneews.com/berita/3388167/ratusan-warga-binaan-lapas-narkotika-jalani-asesmen-untuk-remisi>. Diakses pada tanggal 10 Februari pukul 12.00

## **Undang-Undang**

Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan